

# Keuangan Daerah Tidak Jelas

## Maksimalkan Kontrol Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Laporan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tidak jelas. Dari 503 pemerintah daerah, hanya 13 pemda yang laporan keuangannya mendapat hasil audit wajar tanpa pengecualian. Audit kinerja keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Senin (30/8) di Jakarta, saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR. Rapat kerja tersebut membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009.

Tahun 2009, kata Menkeu, pemerintah pusat mentransfer Rp 309 triliun kepada pemerintah daerah. Sayangnya, publik tidak mengetahui pertanggungjawaban pemanfaatan dana itu. Hal ini karena suasana keterbukaan di pemerintah pusat belum diikuti pemerintah daerah.

Menkeu menjelaskan, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN, Kementerian Keuangan diuji dalam tiga kali Sidang Paripurna DPR. Hal itu belum termasuk pembahasan yang rinci di Badan Anggaran. "Kami mendorong agar perlakuan yang sama diterapkan pada pertanggungjawaban APBD. Suasana dan kepedulian atas laporan keuangan seharusnya bisa dilakukan pada Laporan Keuangan Daerah," tutur Agus Martowardojo.

Saat ini, satu-satunya instrumen pengawasan keuangan daerah, yang bisa digunakan pemerintah pusat, hanya sanksi kepada pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) APBD, yang mulai dihimpun sejak November

tahun sebelumnya.

Untuk APBD 2011, misalnya, daerah harus menyelesaikannya pada akhir tahun 2010. Namun, masih ada beberapa daerah yang menyerahkan Perda APBD pada Mei tahun berjalan. Ini membuat penyerapan anggaran sangat lambat dan berdampak pada pembangunan ekonomi.

Dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah setiap tahun menunjukkan tren meningkat. Tahun 2000, dana yang ditransfer ke daerah Rp 33,1 triliun, tetapi pada 2008 melonjak menjadi Rp 292,4 triliun dan 2009 mencapai Rp 309 triliun.

Dana itu termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian bagi daerah tertentu.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pamudhi, peningkatan anggaran ke daerah sesuai prinsip *money follow function* (dana mengikuti kewenangan). Namun, perlu ada penguatan kontrol, baik internal maupun eksternal.

"Perlu kreativitas pemerintah untuk menyerap hasil pengawasan dari masyarakat. Baik tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban program daerah. Lengkapi dengan sistem insentif dan disinsentif fiskal bagi pemda," ujarnya. (OIN)

### Perkembangan Transfer ke Daerah, 2008-2011

(Miliar Rupiah)

	2008	2009	APBN-P 2010	RAPBN 2011
I. Dana Perimbangan	278.714,7	287.251,5	314.363,3	329.099,3
a. Dana Bagi Hasil	78.420,2	76.129,9	89.618,4	81.994,3
b. Dana Alokasi Umum	179.507,1	186.414,1	203.606,5	221.872,2
c. Dana Alokasi Khusus	20.787,3	24.707,4	21.138,4	25.232,8
II. Dana Otsus dan Penyesuaian	13.718,8	21.333,8	30.249,6	49.319,9
a. Dana Otonomi Khusus	7.510,3	9.526,6	9.099,6	10.274,9
b. Dana Penyesuaian	6.208,5	11.807,2	21.150,0	39.045,0
Jumlah	292.433,5	308.585,2	344.612,9	378.419,2

